ANALISIS KONFLIK SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN

Erik Setiawan
NPP. 33.0775
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: setiawanerik673@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmansjah, SH., M.Si.
Email: heru_rochmansjah@ipdn.ac.id

.

ABSTRACT

Problem Statement: *The study focuses on the issue that the relocation of South Kalimantan Province's capital city from Banjarmasin to Banjarbaru through Law Number 8 of 2022 triggered social conflict in Banjarmasin City, stemming from a centralistic decision-making process with minimal public involvement. Existing academic studies have largely focused on capital city relocation at the national scale or from legal and spatial planning perspectives, leaving the empirical dynamics of social conflict experienced by Banjarmasin's communities particularly the forms and stages of conflict underexplored.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the forms and dynamics of social conflict arising from the capital city relocation policy in Banjarmasin City.* ***Method:*** *This research employed a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with six informants selected using purposive sampling and digital document observation. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, using Ralf Dahrendorf's social conflict theory (authority, group interests, and conflict groups) and Louis Kriesberg's conflict stage theory (emergence, escalation, de-escalation, and termination).* ***Result:*** *The findings reveal that the conflict was rooted in authority imbalance between the central government as the superordinate group and the people of Banjarmasin as the subordinate group excluded from substantive participation. The conflict manifested in three forms: conflict between national units, conflict between organized and unorganized groups, and role conflict within bureaucratic structures. The conflict evolved through four stages emergence, escalation, de-escalation, and termination without reaching genuine resolution.* ***Conclusion:*** *The study concludes that social conflict in Banjarmasin remains in a state of termination without resolution, where root problems of authority inequality, economic concerns, and threats to collective identity remain unaddressed.*

Keywords: Capital City Relocation, Conflict Stage, Dahrendorf Theory, Kriesberg Theory, Social Conflict.

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada permasalahan bahwa pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 memicu konflik sosial di Kota Banjarmasin, yang bersumber dari proses pengambilan keputusan sentralistik dan minim pelibatan publik. Kajian akademik yang ada lebih banyak membahas pemindahan ibu kota dalam skala nasional atau aspek hukum-tata ruang, sehingga dinamika konflik nyata yang dialami warga Banjarmasin belum terdokumentasikan secara empiris. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika konflik sosial yang muncul akibat kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih secara purposive sampling serta observasi jejak digital. Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles dan Huberman, menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf (otoritas, kepentingan kelompok, dan kelompok konflik) serta teori tahapan konflik Louis Kriesberg (kemunculan, eskalasi, de-eskalasi, dan terminasi). **Hasil/Temuan:** Konflik berakar pada ketimpangan otoritas antara pemerintah pusat sebagai superordinat dengan masyarakat Banjarmasin sebagai subordinat yang tidak dilibatkan secara substantif. Konflik termanifestasi dalam tiga bentuk, yakni konflik antar satuan nasional, konflik antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, serta konflik peran dalam struktur birokrasi. Dinamika konflik berkembang melalui empat tahapan yakni kemunculan, eskalasi, de-eskalasi, dan terminasi tanpa resolusi yang sesungguhnya. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik sosial di Kota Banjarmasin berada pada kondisi terminasi tanpa resolusi, di mana akar permasalahan berupa ketimpangan otoritas, kekhawatiran ekonomi, dan ancaman identitas kolektif belum tertangani secara substantif.

Kata kunci: Kepentingan Kelompok, Konflik Sosial, Pemindahan Ibu Kota, Teori Dahrendorf, Teori Kriesberg, Otoritas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Dahrendorf (1959), konflik adalah bagian mendasar dari struktur sosial yang muncul akibat ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang dalam setiap institusi atau organisasi sosial. Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, baik yang dipicu oleh perbedaan etnis, agama, maupun kebijakan pemerintah yang berdampak luas.

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1956 hingga 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, status ibu kota resmi dipindahkan ke Kota Banjarbaru. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memicu resistensi sosial yang cukup signifikan di kalangan masyarakat Banjarmasin yang merasa kehilangan identitas historis dan mengkhawatirkan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Rachmawati dkk. (2021) menjelaskan bahwa pengalaman pemindahan ibu kota di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek tata ruang

dan administrasi pemerintahan, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap aspek sosial, politik, dan penerimaan masyarakat. Keberhasilan pemindahan ibu kota sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dampak perubahan serta membangun dukungan dari kelompok masyarakat yang terdampak

Penolakan terhadap kebijakan ini muncul secara terbuka dari berbagai elemen, mulai dari Wali Kota Banjarmasin, DPRD, Kadin, hingga warga dan organisasi masyarakat. Mereka bersama-sama mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menuntut peninjauan kembali atas keputusan yang dinilai tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai. Meski gugatan akhirnya ditolak melalui Putusan MK Nomor 58/PUU-XX/2022, fenomena ini menyoroti adanya gap yang nyata antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial dari kebijakan tersebut (Riyadi, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kajian akademik mengenai pemindahan ibu kota selama ini lebih banyak berfokus pada pemindahan ibu kota dalam skala nasional, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan perhatian utama pada aspek kebijakan, tata ruang, ekonomi, dan perencanaan pembangunan. Rachmawati dkk. (2021) melalui kajian mengenai praktik pemindahan ibu kota di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota sangat dipengaruhi oleh aspek perencanaan pemerintahan, tata ruang, serta kesiapan pembangunan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat makro dan belum secara mendalam membahas dinamika konflik sosial yang muncul pada masyarakat yang kehilangan status sebagai pusat pemerintahan.

Penelitian Potter (2017) mengenai hubungan lokasi ibu kota dan konflik sipil menjelaskan bahwa keberadaan ibu kota memiliki dimensi politik karena berkaitan dengan distribusi kekuasaan, simbol identitas, dan hubungan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Meskipun memberikan pemahaman mengenai pentingnya posisi strategis ibu kota dalam struktur politik, penelitian tersebut lebih banyak melihat fenomena ibu kota dalam konteks konflik sipil antarwilayah secara luas dan belum mengkaji konflik sosial pada tingkat lokal akibat perpindahan status ibu kota daerah.

Selain itu, beberapa penelitian mengenai konflik akibat kebijakan pembangunan daerah, seperti konflik pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berskala besar dapat memunculkan resistensi masyarakat akibat perbedaan kepentingan, persoalan partisipasi, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada konflik akibat penguasaan ruang dan pembebasan lahan, bukan pada konflik sosial yang muncul akibat hilangnya fungsi dan identitas sebuah kota sebagai ibu kota daerah.

Berdasarkan pemetaan literatur menggunakan VOSViewer terhadap publikasi yang terindeks Scopus, kajian mengenai pemindahan ibu kota masih didominasi oleh tema kebijakan publik, pembangunan wilayah, tata ruang, dan dampak sosial secara umum. Aspek konflik sosial akibat kehilangan status ibu kota daerah secara spesifik masih belum banyak dikaji, terutama mengenai bagaimana masyarakat merespons perubahan status politik suatu kota, bentuk resistensi yang muncul, serta bagaimana pemerintah mengelola konflik tersebut.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bentuk dan dinamika konflik sosial yang terjadi di Kota Banjarmasin akibat kebijakan pemindahan ibu kota. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan konflik yang lebih adil, inklusif, dan peka terhadap konteks lokal oleh pemerintah. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat resistensi masyarakat secara faktual, sehingga perumusan kebijakan mitigasi konflik berisiko tidak tepat sasaran. Selain itu, gap antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial yang dibiarkan menganga berpotensi memunculkan kembali eskalasi konflik di masa mendatang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Saputra dkk., (2023) membahas kerentanan konflik sosial di kawasan IKN Nusantara menggunakan teori Coser, menemukan bahwa potensi konflik horizontal dan vertikal tidak dapat diabaikan jika masyarakat lokal tidak dilibatkan. Faturahman dkk., (2024) mengkaji dampak positif dan negatif pemindahan IKN secara makro dengan pendekatan kualitatif. Nurhemaya dan Sugangga (2021) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat menggunakan mixed method, menemukan dua kubu utama yang pro dan kontra. Hidayat (2023) berfokus pada konflik agraria masyarakat adat di kawasan IKN menggunakan pendekatan ekologi politik kritis. Rahman dkk., (2026) menganalisis konflik pembebasan lahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat perbedakebaran kepentingan antara pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat terdampak, terutama berkaitan dengan proses pembebasan lahan, komunikasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Azizah dkk. (2023) mengkaji pemindahan ibu kota Kabupaten Kerinci dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan menggunakan metode sejarah.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam melihat bahwa konflik dalam pembangunan besar cenderung dipicu oleh rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan kepentingan, serta persoalan lahan. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus, baik dari sisi konteks wilayah, tingkat analisis (makro dan mikro), maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis konflik sosial secara mendalam dalam konteks pemindahan ibu kota daerah dengan pendekatan yang lebih terfokus pada dinamika aktor lokal, terutama dalam konteks konflik yang bersifat berkelanjutan *(protracted conflict)*. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih terfokus pada dinamika konflik sosial dalam proses pemindahan ibu kota, khususnya dengan menekankan relasi antar aktor, bentuk konflik yang muncul, serta mekanisme pengelolaannya dalam konteks lokal yang lebih spesifik.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari segi konteks objek

penelitian, penelitian ini secara khusus berfokus pada Kota Banjarmasin sebagai daerah yang kehilangan status ibu kota posisi yang belum pernah dikaji dalam literatur pemindahan ibu kota di Indonesia. Kedua, dari segi metode, penelitian ini menggunakan data empiris lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi jejak digital. Ketiga, dari segi kerangka teori, penelitian ini mengombinasikan teori konflik Dahrendorf dan teori tahapan konflik Kriesberg sehingga mampu menjelaskan bentuk sekaligus dinamika konflik secara lebih komprehensif, menghasilkan temuan terminasi tanpa resolusi sebagai kondisi konflik yang paling kritis. Keempat, Secara empiris penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji Kota Banjarmasin sebagai kasus spesifik daerah yang kehilangan status ibu kota akibat pemindahan pusat pemerintahan. Perspektif ini penting karena sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah penerima ibu kota baru atau dampak makro pemindahan, sehingga dimensi "daerah yang ditinggalkan" masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dalam melihat dampak sosial-politik pemindahan ibu kota tidak hanya dari sisi pembangunan, tetapi juga dari sisi deprivasi status dan perubahan struktur sosial politik daerah terdampak. Kelima, secara metodologis penelitian ini memperkuat pemahaman konflik sosial melalui pendekatan data empiris lapangan yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi jejak digital, sehingga mampu menangkap dinamika konflik secara lebih aktual dan kontekstual.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika konflik sosial yang muncul akibat kebijakan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena konflik sosial merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan beragam persepsi, kepentingan, serta tindakan aktor yang tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata (Creswell, 2015). Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam konteks spesifik yang terjadi di Kota Banjarmasin sebagai daerah yang terdampak perubahan status akibat kebijakan pemindahan ibu kota (Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan penekanan pada informan kunci (*key informants*) yang memiliki penguasaan informasi, keterlibatan langsung dalam penanganan isu, serta kewenangan institusional terkait konflik yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin sebagai aktor utama dalam koordinasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di tingkat daerah.

Selain itu, informan pendukung terdiri atas Kabid Politik Dalam Negeri, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kesbangpol Kota Banjarmasin yang masing-masing memiliki kewenangan teknis serta pengalaman langsung dalam memantau dan mengelola dinamika konflik sosial di wilayah kota. Untuk melengkapi perspektif aktor terdampak, satu orang warga masyarakat yang mengalami

dampak langsung juga diwawancarai sebagai representasi pengalaman subjektif di tingkat akar rumput.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada tiga pertimbangan akademik, yaitu tingkat penguasaan informasi terkait dinamika konflik, keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan atau pengalaman konflik, serta relevansi institusional terhadap objek penelitian. Jumlah informan ditetapkan hingga mencapai *data saturation* (kejenuhan data), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari informan tambahan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan, melainkan hanya mengulang pola jawaban yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan demikian, penghentian proses pengumpulan data didasarkan pada pertimbangan kecukupan informasi secara teoritis dan empiris, bukan sekadar jumlah informan.

Kedua, observasi dilakukan melalui penelusuran jejak digital (*digital trace observation*) terhadap dinamika konflik sosial yang telah terjadi, dengan objek pengamatan meliputi: (1) pemberitaan media daring, (2) dokumen hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022, (3) pernyataan resmi aktor pemerintah dan pemangku kepentingan yang dipublikasikan secara digital, serta (4) ekspresi dan respons masyarakat dalam media sosial. Media yang digunakan dalam observasi ini meliputi portal berita daring nasional dan lokal, situs resmi lembaga pemerintah, serta platform media sosial yang relevan dengan isu penelitian.

Adapun indikator pengamatan dalam observasi digital mencakup pola narasi konflik, bentuk respons publik (dukungan, penolakan, atau netral), dinamika komunikasi antar aktor, serta perubahan intensitas isu dari waktu ke waktu. Observasi digital ini berkontribusi dalam memahami evolusi konflik pada fase *de-escalation*, mengingat pada saat penelitian dilakukan (Januari 2026) konflik telah mereda sehingga tidak lagi tersedia peristiwa lapangan yang dapat diamati secara langsung.

Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung keakuratan temuan terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin dalam pengelolaan konflik sosial pada proses pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Data dokumentasi ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan instansi, serta dokumen visual dan digital yang relevan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan kunci, informan pendukung, masyarakat terdampak, serta data sekunder dari dokumen hukum, media daring, dan jejak digital media sosial. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menguji konsistensi data melalui perbandingan hasil wawancara mendalam, observasi digital, dan studi dokumentasi. Data dari wawancara diverifikasi silang dengan dokumen resmi, pemberitaan media, serta temuan observasi digital untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan kredibilitas informasi. Dengan mekanisme ini, validitas data penelitian dapat diperkuat melalui proses konfirmasi lintas sumber dan metode.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis konflik sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin menggunakan dua kerangka teori, yakni teori konflik sosial Ralf Dahrendorf yang mencakup dimensi otoritas, kepentingan kelompok, dan kelompok konflik (Dahrendorf, 1959), serta teori tahapan konflik Louis Kriesberg yang mencakup kemunculan, eskalasi, de-eskalasi, dan terminasi (Kriesberg, 1998). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Bentuk Konflik Sosial: Dimensi Otoritas

Dalam perspektif Dahrendorf, konflik sosial berakar pada distribusi otoritas yang tidak seimbang dalam struktur sosial yang terlegitimasi secara formal. Dalam kasus ini, relasi superordinat-subordinat tampak jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai pemegang otoritas pengambilan keputusan, dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berada pada posisi subordinat sebagai pelaksana kebijakan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa otoritas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administrasi, tetapi juga sebagai sumber dominasi struktural yang membatasi ruang partisipasi aktor lokal. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Dahrendorf sebagai *"imperatively coordinated associations"*, di mana kekuasaan terinstitusionalisasi dalam struktur formal dan menghasilkan relasi dominasi yang inheren. Minimnya keterlibatan substantif pemerintah kota dan masyarakat memperkuat asimetri otoritas tersebut, sehingga legitimasi hukum *(legal legitimacy)* tidak berbanding lurus dengan legitimasi sosial *(social legitimacy)*. Dalam konteks ini, konflik tidak muncul karena ketiadaan aturan, tetapi justru karena struktur otoritas yang sah secara hukum gagal mengakomodasi distribusi partisipasi secara adil.

Ketimpangan distribusi otoritas menjadi akar utama dari konflik sosial yang terjadi. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menempati posisi superordinat yang memonopoli seluruh proses pengambilan keputusan, sementara Pemerintah Kota Banjarmasin berada di posisi subordinat yang hanya menerima kebijakan. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin, Bapak Dr. H. Lukman Fadlun, SH., MH: "Kalau kita bicara soal posisi pemerintah kota dalam keputusan pemindahan ibu kota ini, pemkot tidak berada di posisi pengambil keputusan. Keputusan itu ada di level pusat dan provinsi. Kami menerima kebijakan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022." Masyarakat pun tidak dilibatkan secara substantif dalam proses yang menentukan nasib kota mereka. Proses sosialisasi yang berjalan satu arah tidak dapat menggantikan konsultasi publik yang bermakna, sehingga legitimasi sosial kebijakan jauh dari memadai meskipun legitimasi hukumnya kuat.

Untuk memperkuat temuan mengenai ketimpangan distribusi otoritas tersebut, penulis melakukan triangulasi terhadap tiga dokumen sekunder yang merepresentasikan jejak formal dari relasi superordinat-subordinat antara pemerintah pusat/provinsi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1.
Data Sekunder Dimensi Otoritas

No	Sumber	Jenis Dokumen	Kaitan dengan Dimensi Otoritas
1	Perda Kalsel No. 3 Tahun 2022	Dokumen Hukum	Legalisasi otoritas oleh institusi dalam penetapan ibu kota baru
2	Putusan MK No. 58/PUU-XX/2022	Dokumen Hukum	Penutupan jalur hukum sebagai bentuk penegakan otoritas superordinat
3	Artikel Kompas, 2023	Berita Media Massa	Resistensi publik terhadap keputusan otoritatif yang sentralistik

Sumber: Diolah penulis dari Bakesbangpol Kota Banjarmasin, 2026

Ketiga dokumen pada Tabel 1. menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan wawancara: otoritas penetapan kebijakan terkonsentrasi pada institusi superordinat (Perda dan Putusan MK), sementara ruang artikulasi masyarakat hanya muncul dalam bentuk pemberitaan media sebagai saluran resistensi informal. Pola ini mengonfirmasi argumen Dahrendorf bahwa legitimasi hukum yang kuat tidak serta-merta menghasilkan legitimasi sosial, sekaligus memperkuat temuan penelitian bahwa ketimpangan otoritas dalam kasus ini bersifat terstruktur dan terdokumentasi secara formal, bukan sekadar persepsi subjektif informan.

3.2. Bentuk Konflik Sosial: Dimensi Kepentingan Kelompok

Dahrendorf menegaskan bahwa konflik muncul ketika perbedaan kepentingan antara kelompok dominan dan subordinat termanifestasi secara objektif dalam struktur sosial. Dalam kasus ini, kepentingan pemerintah yang berorientasi pada efisiensi administratif dan penguatan pusat pemerintahan berhadapan dengan kepentingan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sejarah, dan identitas kultural. Benturan ini menunjukkan transformasi dari *latent interest* menjadi *manifest interest*, di mana masyarakat Banjarmasin mulai menyadari secara kolektif potensi kerugian struktural yang ditimbulkan oleh kebijakan pemindahan ibu kota. Kekhawatiran ekonomi dan identitas tidak hanya bersifat psikologis, tetapi merupakan bentuk rasionalisasi kepentingan kelompok yang terdampak perubahan struktur distribusi sumber daya dan simbol kekuasaan. Secara teoritis, fenomena ini memperkuat pandangan Dahrendorf bahwa konflik tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, karena status ibu kota berfungsi sebagai sumber legitimasi politik dan identitas kolektif. Oleh karena itu, perubahan status tersebut menciptakan dislokasi kepentingan yang bersifat multidimensi, baik ekonomi, politik, maupun kultural.

Konflik yang terjadi bersumber dari benturan kepentingan yang nyata antara dua logika yang saling berhadapan. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bapak H. Hasan, SKM, MM, menyatakan: "Ini adalah benturan antara kepentingan pembangunan di satu sisi, dengan kepentingan yang bersifat kultural dan identitas di sisi lain. Pemerintah berargumen dari logika efisiensi dan kemajuan. Tapi masyarakat Banjarmasin berargumen dari logika sejarah, budaya, dan pengakuan." Masyarakat Banjarmasin memiliki dua lapisan kekhawatiran yang saling memperkuat: kekhawatiran ekonomi akibat berpindahnya pusat aktivitas birokrasi, dan kekhawatiran identitas akibat hilangnya status simbolis kota yang telah melekat selama

puluhan tahun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan lokasi pusat pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi politik dan sosial terhadap kelompok masyarakat yang terdampak. Potter (2017) menjelaskan bahwa lokasi ibu kota memiliki arti strategis karena menjadi simbol distribusi kekuasaan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Perubahan lokasi pusat pemerintahan dapat memunculkan ketegangan apabila kelompok tertentu merasa kehilangan akses, pengaruh, atau posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Kelompok yang paling rentan terdampak meliputi pedagang dan pengusaha kecil di sekitar kawasan pemerintahan, komunitas budaya Banjar, dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini mendapat perhatian dari institusi provinsi berbasis Banjarmasin.

Benturan kepentingan antara logika pembangunan pemerintah dan logika identitas-ekonomi masyarakat sebagaimana diungkapkan informan juga tergambar dalam data sekunder pada Tabel 2., yang menelusuri jejak dampak ekonomi dan persepsi keadilan distribusi manfaat pasca pemindahan ibu kota.

Tabel 2.
Data Sekunder Dimensi Kepentingan Kelompok

No	Sumber	Jenis Dokumen	Kaitan dengan Kepentingan Kelompok
1	Laporan Pemprov Kalsel, 2023	Dokumen Pemerintah	Pengembangan Banjarbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan
2	Banjarmasin Post, 2024	Berita Media Lokal	Reaksi warga terhadap penurunan nilai ekonomi di Banjarmasin pasca pemindahan ibu kota
3	Survei Kepuasan Publik ULM, 2024	Laporan Akademik	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan distribusi manfaat pemindahan

Sumber: Diolah penulis dari Kesbangpol Kota Banjarmasin, 2026

Data pada Tabel 2. memperlihatkan rangkaian kausal yang relevan dengan temuan penelitian: kebijakan pengembangan Banjarbaru sebagai pusat pertumbuhan baru (sumber 1) memicu reaksi penurunan nilai ekonomi di Banjarmasin (sumber 2), yang pada akhirnya tercermin dalam menurunnya kepercayaan publik terhadap keadilan distribusi manfaat kebijakan (sumber 3). Rangkaian ini memperkuat argumen bahwa kekhawatiran ekonomi masyarakat bukan semata persepsi subjektif, melainkan memiliki dasar empiris yang terdokumentasi secara independen dari hasil wawancara, sehingga memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber.

3.3. Bentuk Konflik Sosial: Dimensi Kelompok Konflik

Menurut Dahrendorf, konflik sosial termanifestasi dalam bentuk pengelompokan sosial yang memiliki kepentingan objektif berbeda dalam struktur otoritas. Dalam kasus ini, terdapat tiga pola utama kelompok konflik yang dapat diidentifikasi secara analitis. Pertama, konflik antar asosiasi terkoordinasi secara imperatif (*imperatively coordinated associations*), yaitu

antara pemerintah pusat-provinsi sebagai pemegang otoritas dengan Pemerintah Kota Banjarmasin beserta perangkat kelembagaannya. Konflik ini menunjukkan bentuk formalisasi resistensi institusional yang termanifestasi melalui jalur hukum, seperti judicial review, yang menandakan bahwa konflik telah memasuki ranah struktural-institusional, bukan sekadar wacana politik. Kedua, konflik antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kelompok terorganisasi seperti DPRD, ormas, dan Kadin beroperasi dalam struktur kepentingan yang relatif terkoordinasi, sehingga artikulasi konflik dilakukan melalui mekanisme formal dan publik. Sebaliknya, kelompok tidak terorganisasi seperti masyarakat dan pedagang kecil merepresentasikan bentuk konflik laten yang termanifestasi secara sporadis melalui media sosial. Secara teoritis, hal ini menunjukkan diferensiasi kapasitas artikulasi kepentingan dalam struktur sosial.Ketiga, konflik peran dalam institusi birokrasi, khususnya pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin, yang merepresentasikan posisi ambivalen dalam struktur otoritas. Dalam kerangka Dahrendorf, kondisi ini dapat dipahami sebagai *role conflict within authority structure*, di mana satu aktor birokratis berada pada posisi subordinat dalam struktur kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi mediator konflik sosial. Situasi ini memperlihatkan bagaimana birokrasi tidak netral secara struktural, melainkan menjadi bagian dari konfigurasi konflik itu sendiri.

3.4. Dinamika Konflik: Tahapan Kriesberg

Mengacu pada kerangka teori Kriesberg (1998), konflik sosial di Kota Banjarmasin berkembang melalui empat tahapan yang dapat dipetakan secara kronologis. Pada tahap kemunculan, kesadaran kolektif masyarakat terbentuk akibat absennya mekanisme partisipasi publik yang substantif dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri mengakui tidak banyak terlibat sebelum undang-undang disahkan. Pada tahap eskalasi, intensitas resistensi meningkat secara signifikan, dipicu oleh kekhawatiran ekonomi dan ancaman identitas historis. Puncak eskalasi terjadi ketika koalisi penolak yang solid mengajukan gugatan ke MK. Kabid Kewaspadaan, H. Rahman Anshari, S.Kep, MA, menilai: "Intensitasnya saya nilai sedang hingga tinggi pada fase puncaknya. Tapi dari sisi bentuknya, konflik ini lebih banyak mengekspresikan diri melalui saluran-saluran yang damai dan formal, bukan melalui kekerasan fisik." Pada tahap de-eskalasi, penurunan intensitas konflik dipicu bukan oleh tercapainya titik temu, melainkan oleh ditolaknya gugatan MK. Ini adalah de-eskalasi struktural yang lahir dari penutupan jalur perjuangan formal, bukan dari kepuasan substantif. Pada tahap terminasi, konflik tampak mereda di permukaan, namun sesungguhnya hanya berpindah bentuk dari konflik manifes menjadi ketegangan laten tanpa satu pun akar permasalahan yang terselesaikan secara tuntas.

Secara teoritis, dalam perspektif Kriesberg (1998), rangkaian tahapan tersebut tidak hanya dipahami sebagai urutan kronologis, tetapi sebagai proses yang saling berkaitan secara kausal dan transformasional. Tahap kemunculan merefleksikan kondisi *perceived injustice* yang menjadi pemicu awal terbentuknya kesadaran kolektif akibat terbatasnya partisipasi substantif. Kondisi ini kemudian secara langsung berkontribusi pada tahap eskalasi, di mana persepsi ketidakadilan tersebut berkembang menjadi polarisasi kepentingan dan penguatan identitas kelompok yang berseberangan. Selanjutnya, eskalasi tersebut mendorong munculnya aksi kolektif yang lebih terinstitusionalisasi melalui jalur hukum, yang sekaligus menjadi faktor penentu masuknya konflik ke tahap de-eskalasi ketika ruang aksi formal tertutup melalui

putusan institusi peradilan. Akhirnya, kondisi ini menyebabkan transformasi konflik menuju tahap terminasi yang bersifat semu, karena bukan dihasilkan dari resolusi substantif, melainkan dari terhentinya mekanisme perjuangan formal. Dengan demikian, hubungan antar tahapan menunjukkan dinamika sebab-akibat yang memperlihatkan bahwa setiap fase konflik merupakan konsekuensi logis dari fase sebelumnya, sekaligus menjadi prasyarat bagi munculnya fase berikutnya dalam siklus konflik sosial.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting penelitian ini adalah kondisi terminasi tanpa resolusi sebagaimana diperingatkan Kriesberg (1998), yakni konflik yang membeku di permukaan namun masih menyimpan bara yang sewaktu-waktu dapat kembali meledak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Saputra dkk. (2023) bahwa konflik akibat pemindahan ibu kota tidak dapat diabaikan jika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara substantif. Berbeda dengan temuan Faturahman dkk. (2024) yang menyoroti pemindahan IKN dari perspektif makro-ekonomi nasional, penelitian ini menemukan bahwa pada tingkat lokal, benturan antara logika efisiensi pemerintah dengan logika identitas dan budaya masyarakat merupakan sumber konflik yang paling mendalam. Sama halnya dengan temuan Nurhemaya dan Sugangga (2021) yang menemukan dua kubu utama pro dan kontra, penelitian ini mengkonfirmasi terbentuknya polarisasi serupa di Banjarmasin, namun dengan temuan tambahan bahwa polarisasi tersebut berkembang melalui tahapan yang dapat dipetakan secara kronologis menggunakan kerangka Kriesberg.

Selain itu, berbeda dengan temuan Hidayat (2023) yang berfokus pada konflik agraria di kawasan IKN, penelitian ini menemukan bahwa konflik yang terjadi di Banjarmasin bersifat non-fisik dan lebih menonjolkan dimensi identitas, simbolisme, dan legitimasi sosial. Hal ini memperluas temuan tentang tipologi konflik yang dapat dipicu oleh kebijakan pemindahan ibu kota.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini menemukan faktor-faktor yang berkontribusi pada kondisi konflik. Faktor pendukung eskalasi meliputi proses pengambilan keputusan yang sentralistik tanpa konsultasi publik yang memadai, kekhawatiran ekonomi yang konkret, dan ancaman terhadap identitas historis Banjarmasin sebagai ibu kota selama puluhan tahun. Faktor yang berkontribusi pada de-eskalasi adalah putusan MK yang menutup jalur perjuangan formal. Namun, keterbatasan pemerintah dalam menghadirkan program kompensasi pembangunan yang nyata bagi Banjarmasin justru memperkuat kondisi terminasi tanpa resolusi. Selama gap antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial ini dibiarkan menganga, potensi konflik untuk kembali memasuki siklus eskalasi baru akan selalu ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi dalam kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya mencapai tahap penyelesaian substantif. Suripto (2016) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik politik perlu diawali dengan pemahaman terhadap faktor penyebab konflik, karena identifikasi akar masalah menjadi dasar dalam menentukan strategi penyelesaian yang tepat.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori konflik Dahrendorf, khususnya dalam memperjelas bahwa ketimpangan distribusi otoritas

tidak hanya menghasilkan relasi dominasi struktural, tetapi juga dapat berlanjut menjadi ketegangan laten yang persisten ketika tidak diikuti oleh mekanisme koreksi kebijakan yang bersifat substantif. Dalam konteks ini, penelitian ini memperkuat tesis Dahrendorf mengenai konflik sebagai produk struktural otoritas, sekaligus menambahkan dimensi bahwa ketidakseimbangan antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial dapat memperpanjang siklus konflik dalam bentuk yang tidak terselesaikan secara institusional.Selain itu, penelitian ini juga memperkaya teori tahapan konflik Kriesberg dengan menunjukkan bahwa de-eskalasi tidak selalu berujung pada resolusi atau stabilitas sosial, melainkan dapat terjadi dalam bentuk *procedural de-escalation* yang disebabkan oleh tertutupnya saluran konflik formal, bukan oleh tercapainya kesepakatan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan pemahaman bahwa terminasi konflik dapat bersifat semu dan berpotensi mereproduksi siklus konflik baru apabila akar masalah tidak diselesaikan secara struktural.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Saputra dkk. (2023), Hidayat (2023), dan Rahman dkk. (2026), temuan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal faktor pemicu konflik berupa rendahnya partisipasi publik dan perbedaan kepentingan aktor. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan penting karena tidak hanya berhenti pada identifikasi faktor konflik, tetapi juga menjelaskan mekanisme transformasi konflik lintas tahapan serta implikasi strukturalnya terhadap keberlanjutan konflik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas fokus kajian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif menjadi analitis-teoretis dengan menekankan hubungan antara struktur otoritas, dinamika konflik, dan keberlanjutan ketegangan sosial**.**

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa konflik sosial di Kota Banjarmasin akibat kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan termanifestasi dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yakni konflik antar satuan nasional, konflik antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, serta konflik peran dalam struktur birokrasi. Dinamika konflik berkembang melalui empat tahapan kemunculan, eskalasi, de-eskalasi, dan terminasi, dengan temuan kritis berupa kondisi terminasi tanpa resolusi di mana seluruh akar permasalahan mencakup ketimpangan otoritas, kekhawatiran ekonomi, dan ancaman identitas kolektif belum tertangani secara substantif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada fase reduksi konflik, sehingga observasi terbatas pada jejak digital dan tidak dapat menangkap dinamika konflik pada puncaknya. Penelitian juga hanya dilakukan di satu lokus yakni Bakesbangpol Kota Banjarmasin, sehingga perspektif dari sisi pemerintah provinsi dan pusat tidak terakomodasi secara langsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan dinamika konflik sosial di Kota Banjarmasin dengan kasus-kasus pemindahan ibu kota daerah lain di Indonesia untuk menemukan pola yang lebih general.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan selama pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh informan yang bersedia berbagi informasi dan perspektifnya demi kelengkapan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azizah, W., Erawati, M., & Junaidi, J. K. (2023). Pemindahan ibu kota kabupaten kerinci dari sungai penuh ke siulak dan perkembangannya (2007-2022). *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 6*(2), 596–608. https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7299

Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press. https://doi.org/10.4324/9781003260257

Faturahman, A. A., Mubarok, A. M. S., Marta, I., Fauzi, R., & Septian, M. A. (2024). Dampak positif dan negatif pemindahan ibu kota negara (IKN). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan, 2*(1), 17–24 https://jpwp.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPWP/article/download/45281/14751

Hidayat, R. (2023). Konflik agraria masyarakat adat dalam pemindahan ibu kota negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1*(1), 140–151. https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/79

Izza, Y. P. (2020). Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, 9*(1), 41–55. https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/636

Kriesberg, L. (2009). Constructive conflict transformation. *Journal of Conflictology, 1*(1), 4–9. http://journal-of-conflictology.uoc.edu/joc/en/index.php/journal-of-conflictology/article/view/vol0iss1-kriesberg.html

Leparatu, F. I., Kusworo, & Tahir, M. I. (2018). *Strategy for conflict completing of the confirmation of regional borders between the Niacoten II Village and Administrative Village Kuanino in East Nusa Tenggara Province. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 10*(2). https://share.google/jz70B9lpldB3lZZhN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan* https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8687_1664432388.pdf

Maney, G. M. (2000). Review: Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution by Louis Kriesberg. *Social Forces, 78*(3), 1181–1183. https://doi.org/10.1093/sf/78.3.1181

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nurhermaya, A., & Sugangga, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat pemindahan ibu kota Jawa Barat. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *10*(3), 123-131. https://doi.org/10.32315/jlbi.v10i03.51

Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). *Capital city relocation in Indonesia: Compromise failure and potential dysfunction*. Cogent Social Sciences, 10(1), 2345930. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2345930

Potter, A. (2017). Locating the government: Capital cities and civil conflict. *Research & Politics, 4*(4), 1–7. https://doi.org/10.1177/2053168017734077

Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 1*(1), 163–175. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253

Rachmawati, R., Haryono, E., & Ghiffari, R. A. (2021). Best practices of capital city relocation in various countries: Literature review. *E3S Web of Conferences, 325*, Article 07004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132507004

Rahman, A., Almawan, L. Y. J., Asrijati, E. R., & Rowi, S. (2026). Analisis konflik pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium, 3*(1), 33–44. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6244/2431

Rochmansjah, H. (2023). Manajemen Konflik dan Kebijakan Publik Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN, 10*(1), 81–87. https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/503/319

Rosana, E. (2015). Konflik pada kehidupan masyarakat (telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik dalam perspektif Islam). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 10*(2), 216–230. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1430

Saputra, A., Liyana, C. I., Sempena, I. D., Mursyidin, & Baihaqi. (2023). Kerentanan konflik sosial di kawasan ibu kota negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1*(1), 61–64. Retrieved from https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/12

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumartono. (2019). Dinamika perubahan sosial dalam teori konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis, 5*(1), 1–17. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1274756

Susanto, H. (2025). *Indonesia's capital city relocation as multi-dimensional national conflicts resolution strategy*. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.1010922

Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land, 13*(5), Article 606. https://doi.org/10.3390/land13050606

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.